

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh *fiscal stress*, kepadatan penduduk dan kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa selama tahun 2014-2016, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. *Fiscal stress* berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat *fiscal stress* pemerintah daerah kabupaten/kota hasil pemekaran, maka akan menyebabkan alokasi belanja modal meningkat.
2. Kepadatan penduduk berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ketika tingkat kepadatan penduduk pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran naik, alokasi belanja modal menjadi menurun. Hal ini disebabkan karena alokasi belanja masih diprioritaskan pada belanja pegawai/belanja tidak langsung, selain itu tingkat kepadatan penduduk pada kabupaten/kota hasil pemekaran belum merata dan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu sehingga pembangunan belum bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.
3. Kinerja keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kinerja keuangan (rasio ketergantungan keuangan) pemerintah daerah kabupaten/kota hasil pemekaran, maka akan menyebabkan alokasi belanja modal akan meningkat.

5.2 Saran

Setelah melakukan pengujian, mendapatkan hasil penelitian serta menarik kesimpulan dari pengaruh *fiscal stress*, kepadatan penduduk dan kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal, maka penulis mengemukakan beberapa saran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota hasil pemekaran

Pertama, untuk mengendalikan tingkat *fiscal stress* pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran harus terus meningkatkan indeks pendapatannya serta tidak lupa untuk terus memperhatikan indeks belanja pelayanannya. Kedua, indikator kepadatan penduduk berupa jumlah penduduk dan luas wilayah harus lebih diperhatikan, karena indikator tersebut adalah faktor penyerap kebijakan publik sehingga pembangunan dapat secara merata dirasakan oleh masyarakat. Ketiga, dalam proses pengalokasian belanja modal sebaiknya mempertimbangkan ketergantungan keuangan yaitu pendapatan transfer yang digunakan secara optimal untuk belanja-belanja yang lebih diprioritaskan sesuai kebutuhan publik. Karena, sebagian besar pendapatan pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran adalah pendapatan dari pusat, sehingga belanja modal akan meningkat.

2. Bagi pemerintah pusat

Perihal keterganguan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, bahwa pemerintah pusat dalam memberikan dana subsidi/transfer yang alasannya adalah untuk mengurangi ketidakseimbangan struktur keuangan antar daerah, harusnya selalu dilakukan evaluasi kebijakan alokasi belanja modal dan alokasi belanja rutin setiap daerah. Karena, pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagian besar mendominasi pendapatan daerahnya. Tujuannya, agar dana transfer pusat ke daerah mampu memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan masing-masing daerah yang implikasinya akan meningkatkan kemandirian daerah hasil pemekaran seperti yang diharapkan.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian se-Indonesia agar mampu mengeneralisasikan hasil penelitian sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih mewakili pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran secara keseluruhan.